

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Humas pemerintah merupakan praktisi hubungan masyarakat pemerintah yang melakukan komunikasi dan penyebaran informasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui kerjasama dengan pers dan melalui sarana media elektronik seperti di situs website pemerintah. Keberadaan unit kehumasan disebuah instansi atau lembaga pemerintah merupakan keharusan secara operasional dan fungsional dalam menyebarluaskan informasi, mempublikasikan kegiatan pemerintah, kebijakan dan aktivitas pemerintahan kepada publiknya.¹

Humas/ *public relations* di instansi milik pemerintah memiliki peran untuk hubungan ke dalam instansi (faktor *intern*), yaitu pihak humas wajib menyerap aspirasi publik/ masyarakat demi tercapainya kepentingan dan tujuan bersama, dan peran hubungan luar instansi (faktor *ekstern*) yaitu memberikan informasi sesuai tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan publik/ masyarakat.²

Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 25 tahun 2017 mengenai tata kelola kehumasan pemerintah yang sebagaimana di tulis pada pasal 6, yang menyebut empat poin pokok yang menyebutkan sebagai berikut: Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Jawa Timur menjalankan empat tugas dan fungsi utama dalam pemerintahan yang *pertama* adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan humas sesuai kebutuhan masyarakat, yang *kedua* adalah pengelolaan informasi yang meliputi

¹ H.A.W. Widjaja, *Komunikasi: Komunikasi dan hubungan masyarakat*, cet. ke-6, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)hal. 3.

² Rosady Ruslan, *metode penelitian public relation dan komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)hal. 341.

pengumpulan data, pengolahan data informasi dan penyebaran informasi strategis baik sektoral ataupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya, yang *ketiga* adalah pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat. Dan yang terakhir *keempat* adalah melakukan pelaksanaan evaluasi kegiatan kehumasan daerah.³

Tugas dan fungsi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Provinsi Jawa Timur sebagaimana disebutkan diatas bertujuan memberikan informasi publik tentang program dan kebijakan pemerintah kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan berbagai informasi yang sedang dan akan pemerintah lakukan. Bakohumas menyebarkan informasi publik di Provinsi Jawa Timur mempunyai sarana media informasi yaitu situs *website* pemberitaan bakohumas yang dapat di akses oleh publik/masyarakat adalah: “<http://bakohumas.jatim.go.id>” yang beranggotakan dari humas pemerintah daerah kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, serta dalam menjalankan tugas dan fungsi bakohumas bersama anggotanya diperlukan koordinasi dan kerjasama antar humas pemerintah guna untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data yang akan diamati dari situs *website* pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang berisikan tentang informasi publik pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan belum berjalan dengan baik serta terjadi masalah dalam keterbukaan informasi publik pada pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur, meskipun sudah ada beberapa anggota Bakohumas yang cukup aktif dalam keterbukaan informasi publik. Akan tetapi yang terjadi masih banyak anggota Bakohumas yang tidak aktif dalam memberikan informasi publik pemberitaan ke media informasi *website* Bakohumas Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian terdapat masalah

³ Dokumen resmi pemerintah Jawa Timur mengenai Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 25 tahun 2017.

atau ada hambatan dalam koordinasi Bakohumas bersama anggotanya sehingga tidak semua anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur akan sadar untuk pentingnya membangun keterbukaan informasi publik. Berdasarkan masalah yang terjadi peneliti ingin melakukan penelitian pada Bakohumaas Provinsi Jawa Timur dengan melihat konten pemberitaan yang di publikasikan ke *website* pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berisi tentang Keterbukaan Informasi Publik memang telah diberlakukan sejak dari tahun 2010. Indonesia sudah memasuki era pemerintahan terbuka (*open government*). Meskipun telah memasuki era pemerintahan terbuka, pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan (*skakeholder*) dan masyarakat mengenai transparansi ataupun keterbukaan informasi publik perlu dipertanyakan implementasinya yang terjadi di pemerintahan padahal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu syarat pemerintahan yang terbuka.

Mengenai implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, masih terjadi dua pertanyaan besar yang muncul sampai saat ini. Adapun yang *Pertama* adalah masalah dari sisi badan publik. Bagaimana kesadaran badan publik pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan memahami mengenai transparansi informasi serta peranannya dalam pemerintahan terbuka. Kemudian yang *Kedua*, adalah masalah dari pihak publik/ masyarakat. Bagaimana pemahaman pengetahuan publik/ masyarakat tentang hak yang dimiliki untuk memperoleh informasi publik dari pemerintah yakni dalam mengakses dan mendapatkan informasi publik yang menjadi haknya. Untuk penelitian ini akan lebih fokus pada faktor yang pertama yaitu masalah dari sisi badan publik pemerintah. Yaitu bagaimana penerapan yang dilaksanakan oleh badan publik pemerintah khususnya pada Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan tentang Standar Layanan Informasi Publik untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh badan publik pemerintah sesungguhnya sudah ada standarnya, baik yang ada di Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan di Peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 Tahun 2010.⁴ Akan tetapi bahwa pada realitanya dengan melihat informasi di *website* pemberitaan badan publik pemerintah sudah bisa menilai bahwa tidak banyak pemberitaan di *website* badan publik pemerintah untuk terbuka atau aktif *meng-upload* berita dalam menyampaikan informasi publik.

Berdasarkan data yang terjadi mayoritas pemerintah daerah atau kota, di Provinsi Jawa Timur masih menutup akses informasi bagi publik. Dari informasi pemberitaan Jatim.com tahun 2017 hanya ada sepuluh pemerintah daerah yang membuka diri. Hasil evaluasi dan pemantauan Komisi Informasi Publik Jawa Timur terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selama 2017 yaitu hanya ada sepuluh pemerintah kabupaten dan kota yang terbuka dalam urusan akses informasi publik, sementara sisanya masuk dalam kategori kurang dan tidak terbuka. Adapun sepuluh pemerintah daerah yang mendapat predikat A atau sangat terbuka adalah Pemerintah Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Kota Blitar.

Sementara yang mendapat predikat B atau terbuka adalah Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Pemerintah Kabupaten Jombang. Sementara lima besar peringkat terbawah atau tidak terbuka dalam urusan akses informasi publik adalah Pemerintah Kabupaten Madiun dengan nilai 6, Pemerintah Kabupaten Nganjuk (12,75), Pemerintah Kota Pasuruan

⁴ Zulaikha, Jurnal Studi Komunikasi, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016, Vol. 1, Ed 2 juli 2017

(13,22), Pemerintah Kabupaten Jember (21.05), dan Pemerintah Kabupaten Kediri (26,24). Ketua Komisi Informasi Publik Jawa Timur, Ketty Tri Setyorini mengatakan monitor dan evaluasi ini kegiatan rutin tahunan, dilakukan pada akhir tahun untuk mengevaluasi bagaimana PPID bisa menjalankan kewajibannya. Dasar kriteria pemantauan dan penilaian tersebut adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016, UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010. "Tujuannya mendorong PPID agar tahu kewajiban mereka, karena Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terbanyak dalam hal penanganan kasus sengketa informasi,".

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016, kategori A (sangat terbuka) adalah daerah yang mendapat nilai 86-100, kategori B (terbuka) 75-85, dan nilai kurang dari 75 masuk dalam kategori kurang dan tidak terbuka. "Ada kategori penghargaan tambahan, yakni website terbaik, meja layanan terbaik, transparansi anggaran terbaik.⁵

Penerapan dalam keterbukaan informasi publik yang dilakukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pemberitaan di media informasi *website* kurang terbuka dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, masih banyak anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang berada di pemerintah daerah tidak aktif dalam mengimplementasikan pemerintahan terbuka. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 25 Tahun 2017 yang telah dibuat untuk dilaksanakan praktisi Bakohumas Provinsi Jawa Timur guna mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur. Bila masalah ini terus terjadi maka akan membuat citra yang negatif.

⁵ <http://beritajatim.com>, mayoritas pemda di jawa timur masih tutup akses informasi. diakses tanggal 26 Desember 2018, 11.28.

Berawal dari permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian pada pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang bertujuan ingin mengetahui bagaimana bagaimana peran Bakohumas Provinsi Jawa Timur dalam membangun keterbukaan informasi publik dan bagaimana koordinasi bakohumas bersama anggotanya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian secara ilmiah dan selanjutnya dijadikan sebagai pembahasan untuk membuat skripsi dengan judul **“Peran Bakohumas Provinsi Jawa Timur Dalam Membangun Keterbukaan Informasi Publik”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan permasalahan dalam penelitian dibuat berdasarkan latar belakang di atas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran bakohumas provinsi jawa timur dalam membangun keterbukaan informasi publik?
- b. Bagaimana koordinasi bakohumas provinsi jawa timur dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran bakohumas provinsi jawa timur dalam membangun keterbukaan informasi publik.
- b. Untuk mengetahui koordinasi bakohumas provinsi jawa timur dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis (manfaat bagi ilmu pengetahuan) dan manfaat secara praktis (manfaat bagi dunia kerja).

- a. Secara Teoritis
 - a) Untuk hasil dari penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang dan dapat dijadikan wawasan pengetahuan tentang Peran Bakohumas Provinsi Jawa Timur.
 - b) Untuk hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan untuk bahan referensi serta bahan pembelajaran khususnya pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- b. Secara Praktis

Untuk hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang berguna bagi instansi Bakohumas Provinsi Jawa Timur untuk mempertahankan citra yang positif dan menjalin hubungan yang baik dengan publik/ masyarakat, terutama di website pemerintah.

E. Batasan Masalah

Berkaitan dengan kehumasan, humas mempunyai ruang lingkup yang cukup luas dan unsur yang banyak, untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang ditemukan di lapangan semakin melebar dari pembahasan skripsi ini saat melakukan penelitian, maka dengan ini peneliti membuat batasan masalah penelitian. Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Batasan bahasan

Penelitian ini hanya terbatas membahas mengenai peran dan koordinasi Bakohumas Provinsi Jawa Timur dalam membangun keterbukaan informasi publik yang dilakukan Bakohumas Jawa Timur untuk mewujudkan pemerintahan terbuka. Di luar bahasan tersebut tidak akan dibahas sama sekali dalam penelitian agar penelitian ini lebih fokus pada hasil pembahasan.
- b. Batasan obyek penelitian (narasumber)

Pada penelitian ini batasan objek penelitian hanya terbatas pada konten pemberitaan pada situs *website* Bakohumas Provinsi Jawa Timur pada

bulan Januari 2019. Untuk narasumber wawancara yang digunakan dari pengurus pemberitaan Bakohumas di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang di anggap terkait langsung dalam pengurusan Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

F. Kajian Riset Sebelumnya

No.	Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Arief Haryanto	Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada wilayah Kabupaten Sleman (Jurnal dipublikasikan pada jurnal UNISIA Volume XXXIII No. 75 Juli 2011)	Penelitian ini menyimpulkan penerapan UU KIP yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten Sleman, yang hasilnya telah mendapatkan penghargaan nasional di tahun 2012 sebagai juara 2 untuk kategori laporan kerja humas pemerintah daerah provinsi/kabupaten dari Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).	Penelitian terdahulu menjelaskan Implementasi KIP yang dilakukan pemerintah kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ingin mengetahui peran badan humas pemerintah dalam menerapkan UU KIP di Jawa Timur.

2.	Titis Hidayati	Peran Humas untuk Penerapan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik (Studi Kasus di Badan Pemeriksa Keuangan RI) (SKRIPSI)	Penelitian ini bertujuan untuk menemukan keterlibatan humas dalam praktik implementasi UU No. 14 Tahun 2008 di BPK RI, Humas BPK RI sudah mampu untuk menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 tetapi masih harus membentuk struktur PPID untuk memperbaiki kekurangannya.	Penelitian terdahulu menjelaskan hubungan antara humas BPK RI dengan Undang-undang keterbukaan informasi publik, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan selain ingin mengetahui hal tersebut juga ingin mengetahui koordinasi antar humas pemerintah.
3.	Ardwitya Tirza Krisantari	Peran Humas/ PR dalam Penerapan Keterbukaan	Penelitian ini menyimpulkan humas bank Indonesia dalam	Penelitian terdahulu menjelaskan peran humas

		<p>Informasi Publik di Bank Indonesia: Studi Kasus kepada <i>Bank Indonesia CALL & InteRAction</i> (BICARA) (SKRIPSI)</p>	<p>konteks implementasi pada <i>Bank Indonesia CALL & InteRAction</i> (BICARA), berperan pada bidang manajemen, hal tersebut terkait struktur humas dalam BICARA yang berada pada posisi kepala divisi hingga manajer, sementara bagian teknis dikerjakan oleh <i>agents</i> yang telah diseleksi melalui lembaga <i>outsourcing</i> yakni PT. Telexindo Bizmart.</p>	<p>untuk menjalankan proses penerapan keterbukaan informasi melalui media <i>Bank Indonesia CALL & InteRAction</i> (BICARA) sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih fokus pada peran Bakohumas dalam membangun keterbukaan informasi publik di Jawa Timur.</p>
--	--	---	---	--

G. Metodologi Penelitian

a. Paradigma Penelitian

Paradigma yaitu suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Adapun maksud paradigma yaitu seperangkat keyakinan mendasar sebagai sistem filosofis pokok yang merupakan konstruksi manusia yang mengarahkan manusia untuk penelitian ilmiah hingga sampai kepada kebenaran realitas untuk disiplin keilmuan tertentu yang berorientasi pada proses menyesuaikan yang tidak terkait perlakuan tunggal, tetapi lebih fokus kepada realitas yang terjadi.⁶

Kenyataan-kenyataan empiris yang terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain, karena itu setiap fenomena sosial diungkapkan secara holistik.⁷ Paradigma penelitian memanfaatkan kegiatan manusia sebagai instrument untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi sosial.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau perkataan dari seseorang yang diamati.⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif lebih tepatnya yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi pada penelitian ini, dimana peneliti akan mengkaji peran badan publik pemerintah Bakohumas Jawa Timur untuk menerapkan undang-undang keterbukaan informasi publik pada konten pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur selama bulan januari 2019. Di sini peneliti bertindak sebagai aktivis

⁶ M. Syamsuddin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 13-14.

⁷ M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 59.

⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), hal.8

⁹ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasada Press, 1996), hal. 13.

yang memberikan makna secara deskriptif pada realitas yang terjadi pada objek penelitian yang diamati.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Sugiyono menyebutkan bahwa : “Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.¹⁰

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif adalah dengan cara mencari informasi mengenai fenomena yang ada, diartikan dengan jelas tujuan yang akan diperoleh, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan dalam membuat penelitian. Selanjutnya penelitian ini peneliti ingin mengetahui peran badan publik pemerintah Bakohumas Provinsi Jawa Timur dalam membangun keterbukaan informasi publik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, metode deskriptif yang berhubungan pada observasi dan suasana alamiah di lapangan saat penelitian. Peneliti bertindak sebagai pengamat, ia hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya.¹¹

Proses penelitian kualitatif lebih fleksibel dalam artian langkah selanjutnya akan ditentukan oleh temuan selama proses penelitian. Teori digunakan sebagai acuan penulisan supaya fokus penelitian sesuai pada fakta dilapangan. Selain dari itu, teori juga digunakan dalam memberikan gambaran umum tentang latar belakang yang diteliti dan menjadi bahan pembahasan hasil penelitian.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014)hal.6

¹¹ Drs. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc, *Metode Penelitian Komunikasi*, cet. ke-12, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 25

c. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintahan) Provinsi Jawa Timur, sedangkan Objek yang dijadikan sumber penelitian ini adalah konten pemberitaan pada situs *website* Bakohumas Provinsi Jawa Timur. Objek penelitian akan dibahas lebih lanjut pada BAB III

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Jalan A. Yani 242-244 Surabaya. Sebab admin dan pengurus pemberitaan *website* Bakohumas Provinsi Jawa Timur berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

e. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengambilan naskah berita di *website* Bakohumas Provinsi Jawa Timur pada pemberitaan bulan januari 2019. Sementara untuk data skunder dalam penelitian ini adalah observasi yang dilakukan peneliti serta study pustaka untuk menunjang penelitian yang dilakukan, dengan membaca dan mengutip sumber-sumber tertulis dari jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

f. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab perumusan masalah pada penelitian ini. Cara pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai dengan cara diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian diberi tanggapan pada saat proses wawancara. Proses

wawancara dilakukan dengan cara komunikasi interpersonal, komunikasi yang terjadi antara dua orang peneliti dan narasumber untuk memperoleh keterangan dari narasumber dan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap hal-hal yang sesuai dengan topik penelitian dan mendapatkan data mengenai Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

2. Dokumentasi

Dokumen yang dipakai adalah dokumen-dokumen resmi milik pemerintah Jawa Timur. Dokumen ini berbentuk tulisan, gambar, dan karya ilmiah. Dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data yang berasal dari arsip atau dokumen mengenai Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Provinsi Jawa Timur.

3. Observasi

Penelitian ini melakukan observasi di lokasi penelitian pada saat praktik profesi mahasiswa (PPM) dimana peneliti datang di tempat kantor Dinas Kominfo Jawa Timur yang melakukan kegiatan pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur. Observasi dilakukan saat peneliti terjun langsung ke lapangan yang berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan mengamati kegiatan pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

g. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dalam pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan didahului oleh upaya membaca dengan cermat dan teliti setiap pemberitaan di *situs website* Bakohumas Provinsi Jawa Timur selama bulan januari 2019 yang menjadi objek penelitian. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini digunakan untuk menganalisa data dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyimpulkan hasil dari keterbukaan informasi publik pada badan publik pemerintah Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

Analisis data ini selanjutnya melakukan penggolongan sesuai instrumen yang ada pada pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang mengandung keterbukaan informasi publik dan yang tidak mengandung keterbukaan informasi publik sehingga mendapatkan kesimpulan yang akurat dan jelas. Sedangkan untuk penyajian data pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur guna memperoleh data yang valid. Langkah akhir dalam analisis data ini ialah menarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar dan daftar isi. Untuk memahami pembahasan skripsi ini perincian sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan pada sub bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, kajian riset sebelumnya, paradigma penelitian, metode penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pembahasan pada sub bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang dijadikan landasan untuk pembahasan pada bab selanjutnya. Adapun pembahasan kajian pustaka ini adalah: humas pemerintah, implementasi Bakohumas melalui kehumasan, peran humas dalam pemerintahan, keterbukaan informasi publik, dan keterbukaan informasi publik pada

pemerintah terbuka (*open government*) menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas seputar objek penelitian berupa sejarah Bakohumas, Bakohumas Prov. Jawa Timur, dan susunan keanggotaan Bakohumas Prov. Jawa Timur.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data penelitian yang kemudian akan dipaparkan secara deskriptif.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus memberikan saran terhadap permasalahan yang muncul, guna memenuhi tujuan dan manfaat penelitian.